**KASUS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TERIMA SUAP
SALAH SATU CLIEN DITINJAU DARI TATANAN MORAL OBJEKTIF OLEH
THOMAS AQUINAS**

Dr. A. W. Dewantara, S. S., M.Hum

Oleh :

Novela Widi Kurnia (51416052)

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN MANAJEMEN

2018

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan seseorang dalam menjalankan kehidupannya diperlukan akal budi, hati nurani yang baik, kejujuran, mempunyai rasa keadilan sesama manusia agar dalam menjalin hubungan dengan sesama dapat berjalan harmonis selain itu manusia harus memiliki tatanan moral seperti tatanan moral subjektif maupun tatanan moral objektif. Agar setiap manusia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Saat ini kerap terjadi kasus kejahatan yang dilakukan dengan ketidakjujuran, ketidakadilan, walaupun tidak bermuatan kekerasan namun kejahatan ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap bangsa kejahatan tersebut salah satunya adalah tindakan korupsi.

Kata Kunci : Korupsi, Tatanan Moral Subjektif, Tatanan Moral Objektif

BAB I

LATAR BELAKANG

Semakin berkembangnya zaman menimbulkan banyak dampak mulai dampak positif maupun negatif yang sekaligus diikuti oleh berkembangnya pemikiran- pemikiran yang berujung kejahatan. Berbagai kejahatan timbul yang salah satunya adalah korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang sering kali terjadi di Indonesia bahkan dinegara-negara lain korupsi juga menjadi hal yang sudah biasa bahkan sudah mendarah daging.

Korupsi di negara berkembang seperti di Indonesia juga sangat tinggi bahkan hampir di setiap media massa terkabarkan adanya kasus korupsi. Meskipun sudah terbentuk hukum yang mengatur korupsi dan juga badan pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun masih saja terjadi. Hukum saat ini tidak dianggap sebagai hal yang menakutkan karena hukum yang berlaku tidak tegas bahkan dapat dibeli terutama bagi orang-orang yang berkuasa.

Korupsi banyak dilakukan oleh oknum - oknum berdasari karena mereka merasa mempunyai kekuasaan yang mereka gunakan untuk melakukannya. Korupsi bukan kejahatan yang mengandung kekerasan namun mengandung penipuan yang notabennya tidak tampak. Korupsi juga dilakukan bukan karena mereka merasa kekurangan namun karena sifat mereka yang tamak dan tentunya mempunyai niat untuk melakukannya.

Sebagai seorang yang memiliki hati nurani yang baik dan berakal budi tidak seharusnya seseorang berbuat kejahatan yang merugikan banyak pihak dan juga berdampak bagi negara mereka sendiri karena mereka akan berpikir sesuai dengan hati nurani nya yang baik. Dan seorang juga harus menjunjung keadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya walaupun salah satu dari mereka mempunyai kekuasaan hal tersebut juga terlihat pada hukum natura oleh Thomas Aquinas untuk memahami konsep keadilan.

Pembahasan dalam papper ini akan memfokuskan terkait kasus suap yang dilakukan oleh hakim pengadilan negeri jaksel dan juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus suap tersebut. Dimana untuk memperkaya diri mereka sendiri mereka menerima suap dari salah satu clien mereka untuk melancarkan perkara yang diajukan. Terlihat bahwa hakim tersebut tidak menerapkan keadilan dalam menangani kasus tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

Tindakan manusia haruslah berdasarkan pada tatanan moral yang baik agar dalam bertindak mereka mampu membedakan baik ataupun buruk yang mana yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. Tatanan moral sendiri diklasifikasikan menjadi dua yaitu tatanan moral subjektif dan tatanan moral objektif. Tatanan moral diperlukan untuk merefleksikan manusia dalam hal bagaimana manusia sebaiknya melakukan tindakannya.

Tatanan moral subjektif merupakan suatu penilaian tindakan baik maupun buruk yang berkaitan langsung dengan tatanan moral seseorang sebagai subjek pelaku atas perbuatannya. Setiap bertindak manusia perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam membuat keputusan sesuai dengan hati nurani mereka yang baik. Hati nurani disini merupakan kapasitas manusia sebagai pembeda baik dan buruk. Jika manusia melakukan tindakan buruk mereka tidak bisa lepas dari sanksi subjektif dimana mereka akan terus dihantui oleh rasa bersalahnya atas tindakan yang dilakukannya.

Dalam tatanan moral subjektif terdapat beberapa karakteristik dari hati nurani manusia diantaranya merupakan hati nurani sesat, hati nurani bimbang, hati nurani tumpul, hati nurani skrupel, dan hati nurani tajam. Salah satu hati nurani yaitu hati nurani tumpul adalah hati yang kurang atau bahkan tidak sadar pada nilai-nilai kebenaran yang semakin lama kesetiannya terhadap hati nurani itu sendiri menjadi tumpul. Tumpul tidak memahami kebenaran dan kesetiaan hidupnya akan tersisih. Hati nurani tumpul ini dapat terbentuk oleh beberapa penyebab yaitu materialisme, sekularisme, konsumerisme, hedonisme dan lain sebagainya.

Tatanan moral objektif merupakan pedoman baik maupun buruk yang ada dalam hidup bersama dan disepakati bersama demi kebebasan. Jadi tatanan moral objektif lebih menekankan pada hukum yang berlaku dan yang telah disepakati bersama. Maka jika manusia melakukan tindakan negatif atau kesalahan, selain dia terkena sanksi dari moral subjektif yaitu sanksi di hantainya rasa bersalah dia juga akan terkena sanksi hukum yang berlaku di sekitarnya sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat. Hukum yang menjadi pedoman yang telah disepakati bersama ini antara lain peraturan, UUD 1945, UU yang berlaku, dan lainnya. Dimana sanksi yang didapatkan berupa denda, hukuman mati, hukuman penjara dan lainnya.

Hukum adalah sesuatu yang mengikat dan apabila melanggarnya mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka dengan mendapatkan sanksi. Hukum dibentuk agar dalam menjalankan kehidupan manusia lebih terarah dan teratur tidak bertindak sesuka hati, yang kemungkinan akan merugikan orang disekitarnya. Hukum menurut bahasa latin yaitu "*lex*". *Lex* juga berasal dari "*ligare*" yang artinya mengikat, "*legere*" artinya menghimpun, membaca. Artinya selain hukum itu mengarahkan tindakan manusia agar tidak melenceng, dia dapat menghimpun banyak orang.

Thomas Aquinas menyebut hukum adalah positif yang artinya hukum tersebut diberlakukan di dalam masyarakat. Ada beberapa gagasan hukum menurut Thomas Aquinas antara lain *ordo rationis* atau *ordinance of reason* (tatanan akal budi), tatanan akal budi untuk mengejar *bonum commune* / *the common good* (kesejahteraan umum),

BAB III

STUDI KASUS

Saat ini kasus suap ataupun korupsi marak terjadi dan menjadi hal yang biasa, apalagi oknum yang melakukan korupsi ini kebanyakan adalah para pejabat berdasari dan yang mempunyai kekuasaan. Kali ini kasus suap kembali hadir di lingkungan pengadilan negeri di Indonesia yang kali ini terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dimana saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), mereka membongkar adanya kasus suap yang diduga ada 6 orang yang salah satunya adalah Hakim Pengadilan Negeri Jaksel dan panitera Pengadilan Negeri Jaksel.

KPK menduga kasus suap dua hakim yaitu Iswahyudi Widodo dan Irwan serta panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Ramadhan menerima suap sebesar \$47 ribu dari Martin P Silitonga sebagai pihak swasta melalui Arif sebagai advokat. Kasus suap tersebut terbongkar OTT oleh satgas KPK pada Selasa, 27 November 2018 dengan kronologi penangkapan yang pertama KPK menangkap Arif Fitriawan dan rekannya di sebuah restoran di daerah Tanjung Barat sekitar pukul 19.00 WIB. Yang selanjutnya tim menangkap panitera Muhammad Ramadhan di rumahnya, di kawasan Pejaten Timur sekaligus menangkap hakim Iswahyudi dan Irwan di tempat kos mereka masing-masing di Jalan Ampera Raya, Jaksel. Pihak KPK juga mengamankan uang sebesar \$47 ribu yang diduga terkait dengan kasus suap tersebut di rumah Muhammad Ramadhan.

Setelah enam orang yang terlibat tersebut ditangkap, tim KPK langsung membawa ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan lima orang tersangka diantaranya Iswahyudi, Irwan, dan Ramadhan sebagai penerima suap serta Martin dan Arif sebagai pemberi suap. Pihak pemberi suap melakukan suap pada hakim dan panitera PN Jaksel terkait perkara yang di daftarkan pada Pengadilan Negeri pada 26 Maret 2018. Perkara tersebut di laporkan atas nama Isrulah Achmad sebagai penggugat dan pihak tergugat Williem JV Dongen yang juga melibatkan PT Asia Pacific Mining Resource (APMR) dan Thomas Azali. Kedua pihak tersebut melaporkan gugatan atas pembatalan akuisisi PTCitra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT Asia Pacific Mining Resource (APMR) yang selanjutnya untuk memuluskan penanganan perkara tersebut, pihak tergugat meminta bantuan pada hakim dan panitera PN Jaksel dengan memberikan sejumlah uang pada mereka.

Penangkapan hakim oleh KPK terkait suap ataupun korupsi, Mahkamah Agung pun mengutuk keras perbuatan para hakim yang tentunya akan merusak nama baik lembaga baik internal maupun eksternal. Padahal pihak Mahkamah Agung sudah melakukan beberapa pembinaan dan pengarahan yang maksimal untuk para hakim, adanya peringatan bahwa korupsi itu berbahaya, adanya aturan baik PERMA bahkan Maklumat dari Ketua. Namun mereka para hakim tidak mengindahkan hal tersebut. Dalam hal ini ketua atau atasannya dapat bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya tersebut jika atasan tidak melakukan pembinaan-pembinaan seperti disebutkan diatas. Namun jika atasan sudah melakukan banyak peringatan namun tidak diindahkan, atasan tidak dapat bertanggungjawab atas hal tersebut karena memang itu kesalahan yang mereka dan mereka harus bertanggungjawab atas kesalahannya.

BAB V

PEMBAHASAN

Kasus korupsi kembali hadir dilingkungan Penegak Hukum yang kali ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim yang seharusnya menegakkan keadilan malah melakukan sebaliknya. Hakim yang jugamemahami akan hukum seharusnya dalam bertindak harus lebih terarah tidak malah bertindak melawan hukum. Melihat sedikit uraian di atas, papper ini akan membahas kasus tersebut dengan tinjauan tatanan moral subjektif dan tatanan moral objektif.

Dilihat dari tatanan moral subjektif yang mengarah pada hati nurani dimana hati nurani merupakan kapasitas manusia baik maupun buruk, dalam kasus tersebut oknum-oknum penerima suap tergolong manusia yang mempunyai hati nurani dengan kapasitas yang buruk. Perbuatan mereka (tersangka suap) sudah jelas bahwa menerima suap adalah tindakan buruk apalagi mereka adalah para hakim yang seharusnya sangat memahami mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus di hindari. Selain pihak penerima suap, pihak pemberi suap pun masuk dalam kategori hati nurani yang berkapasitas buruk. Padahal mereka sadar akan perbuatannya tersebut adalah salah. Keduanya juga dapat dikatakan mempunyai hati nurani tumpul (*conscientia laxa*) yaitu hati yang kurang peka terhadap nilai-nilai kebenaran sehingga semakin lama kesetiaannya pada hal yang benar atau hati nurani menjadi tumpul. Lebih menomorsatukan materialisme sehingga kebenaran dan kesetiaan nurani tersisihkan.

Banyaknya kasus yang serupa mengenai korupsi tidak membuat mereka merasa miris malahan mereka menambah daftar para koruptor hal tersebut sangatlah mengenaskan, ya mungkin kembali lagi pada hati nurani mereka yang sudah tumpul. Padahal dampak dari korupsi yang dilakukan khususnya jika dilakukan oleh para pejabat dan petinggi negara sangatlah besar, antara lain merugikan negara karena tidak terbangunnya infrastruktur dengan baik, pembiayaan untuk anak sekolah yang seharusnya bisa gratis tidak dapat terwujudkan karena uang negara dipakai oleh para petinggi yang memiliki sifat tamak tidak puas atas apa yang sudah dia miliki.

Ditinjau dari tatanan moral objektif, kasus diatas menjelaskan bahwa tatanan akal budi untuk mengejar *bonum commune (the common good)* atau kesejahteraan umum telah gagal dipahami. Thomas Aquinas berpendapat bahwa suatu hukum mempunyai target untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam kasus ini hakim tidak mengutamakan kepentingan

umum atas perkara yang akan dia tangani, namun mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi. Menerima suap yang dilakukan hakim dan panitera PN Jaksel hanya untuk mengejar kepentingan pribadi, hanya untuk memperkaya diri sendiri dan mengorbankan pihak lain.

Pemahaman mengenai hukum natura oleh Thomas Aquinas sangat penting untuk memahami konsep tentang keadilan maupun hak asasi manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan dan merasakan keadilan, jika seorang hakim sebagai pihak yang seharusnya bisa membela kebenaran dengan adil namun semakin lama semakin luntur dan semakin lama seorang hakim dapat dibeli dengan mudah khususnya bagi orang-orang yang berkuasa. Bagaimana rakyat khususnya rakyat kecil bisa merasakan keadilan? Dimana lagi rakyat mencari keadilan? Hukum di Indonesia pun sekarang sudah semakin tidak di takuti karena kurang tegas dalam memberi sanksi dan lagi-lagi tidak berpedoman keadilan. Terlihat bahwa saat ada oknum berkuasa melakukan korupsi yang begitu banyak kerugian yang di alami negara dan rakyat biasa melakukan kesalahan yang tidak sebegitu besarnya dari kerugian korupsi hukuman yang didapatkan mereka hampir sama bahkan jika dilihat bisa lebih berat hukuman rakyat biasa. Adapun saat di dalam penjara oknum-oknum berkuasa malah diberi fasilitas yang lebih bagus dari penjara-penjara lainnya. Bagaimana korupsi bisa hilang dari negara kita jika seterusnya hukum tidak tegas seperti sekarang?

Dibentuknya badan Komisi Pemberantasan Korupsi disini juga sangat membantu memberantas kasus-kasus korupsi walaupun masih saja muncul tetapi badan KPK ini sangat bermanfaat bagi negara. Yang diharapkan juga dari tim KPK mempunyai hati nurani yang baik sehingga tidak ada kecurangan dan tidak menyembunyikan masalah seperti korupsi sekarang ini. Selain itu adanya gerakan masyarakat anti korupsi yang perlu adanya tekanan kuat dari para masyarakat luas juga diperlukan agar korupsi dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Dan yang paling penting adalah hukuman atas perbuatan tersebut harus tegas!

BAB VI

PENUTUP

Dari beberapa penjelasan diatas, semoga bermanfaat sebagai sebuah refleksi diri kita sebagai manusia yang diciptakan memiliki akal budi dan berhati nurani. Semoga kita memiliki hati nurani dan akal budi yang baik sehingga dalam bertindak kita dapat membedakan mana yang benar baik dan yang salah, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Dan semoga kita dapat menjadi orang yang mempunyai sifat adil, jujur, dan berakhlak baik agar orang mempercayai kita dan bermanfaat bagi semua orang.

Hukum sebagai sesuatu yang mengikat seharusnya memiliki ketegasan dalam menerapkannya agar orang yang melanggar hukum merasa jera dan tidak melanggar kembali. Melihat ketegasan suatu hukum manusia yang tidak melanggar hukum akan merasa takut untuk melanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Dewantara, Wisnu Agustinus. 2017. *Filsafat Moral*. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius. ISBN: 978-979-21-529-1

Dewantara, A. Kasus Loli Candy's Ditinjau Dari Etika Dan Teori Hati Nurani.

Rahayu, A., & Dewantara, A. (2018). STUDI KASUS EKSEKUSI MATI TKI INDONESIA (TUTI TURSILAWATI) DITINJAU DARI TEORI TINDAKAN MANUSIA, TATANAN MORAL SUBJEKTIF, DAN TATANAN MORAL OBJEKTIF.

Dewantara, A. W. (2013). Merefleksikan Hubungan antara Etika Aristotelian dan Bisnis dengan Studi Kasus Lumpur Lapindo. *Arete*, 2(1), 23-40.

www.liputan6.com

<https://www.liputan6.com/news/read/3782514/kronologi-kpk-tangkap-2-hakim-pn-jakarta-selatan?source=search>